

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah.* (2014). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* (2004). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 *Tentang Pinjaman Daerah.* (2005). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akutansi Pemerintah.* (2010). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2006). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.* (2016). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.* (2013). Jakarta.
- Atmaja, K.F. (2012). ‘Analisis rasio keuangan untuk memprediksi kemungkinan financial distress. *Accounting Analysis Journal* (2) 1. Hlm. 1-7.
- Dwijayanti, S.P.F. (2010). ‘Penyebab, dampak, dan prediksi dari *financial distress* serta solusi untuk mengatasi *financial distress*’. *Jurnal Akuntansi Kontemporer* Vol. 2, No. 2. Hlm. 191-205
- Dwirandra, A.A.N.B. (2008). ‘Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi Bali tahun 2002-2006. *Universitas Udayana.* Hlm. 01-21.
- Farhan, Y., Sucipto, Y., Khadafi, U.S., Hakim, L., Mulyanti, E. & Prayitno, H. (2012). *Kupas tuntas hubungan keuangan pusat daerah.* Jakarta: Seknas Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gundono. (2016). *Teori organisasi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akutansi keuangan daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan, R & Herususnto, K. (2015). ‘Penggunaan teknik data *mining* untuk memprediksi *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia’. *Proceeding Petemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional* ke-2. Banten
- Husniati, S., Fitriasuri & Wahasusmiah, R. (2016). ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress*’. Seminar Nasional Global Competitive Avantage, ISBN: 978-602-74335-0-2, hlm. 150-157.
- Jones, S & Walker, G.R. (2007). ‘Explanators of local government distress’. *Journal Accounting Foundation, The University of Sydney*. Hlm. 396-418.
- Kaunang, C.E., Naukoko, A.T & Londa, A.T. (2016).’Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah : studi pada kota manado (2010-2014)’. *Jurnal berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 2. Hlm. 355-365.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi daerah menuju era baru pembangunan daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ncube, M & Vacu, N. (2015). ‘Measuring fiscal distress in south african local government sector’. *Division of Revenue*. South Africa. Hlm. 110-140.
- Noviandri, T. (2014). ‘Peranan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kondisi *financial distress* perusahaan sektor perdagangan’. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2 No. 4. Hlm. 1655-1665.
- Raharjo, E. (2007). ‘Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi’. *Fokus Ekonomi*, Vol. 2, No. 1. Hlm. 37-46.

Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sartika, D. (2014). ‘Analisis prediksi *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di indoensia peiode 2011-2013’. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Hlm. 5-19.

Sijabat, M.Y., Saleh, C & Wachid, A. (2013). ‘Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah’. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2. Hlm. 236-242

Sistiana, M. & Makmur, M.H. (2014). ‘Derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten/kota’. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 4. Hlm. 277-286.

Sitanggang, P. (2014). *Manajemen keuangan perusahaan* Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, Basri, H & Faisal. (2016). ‘Analisis kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di aceh dan di sumatera utara’. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 23, No. 1. Hlm. 63-71.

Sutaryo, (2010). ‘Nilai relevan informasi laporan keuangan terhadap *financial distress* pemerintah daerah di indonesia’. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII*, Purwokerto. Hlm. 1-33.

Syurmita. (2014). ‘Prediksi *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia’. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII*, Lombok. Hlm. 1-27.

Trussel, J.M & Patrick, P.A. (2009). ‘Predicting fiscal distress in special district government’. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 25 (4). Hlm. 590-616.